

Tata Kelola Kolaboratif Ekowisata Berbasis Masyarakat Adat dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak

Agustin Amalia¹, Jumanah²

¹⁻²Program Studi Administrasi Publik, Insitutut Kemandirian Nusantara

¹agustinamalia1877@gmail.com, ²jumanah1011@gmail.com

Corresponding author: agustinamalia1877@gmail.com

Submitted: 27/06/2026; Revised: 13/07/2026; Published: 25/07/2026

DOI: <https://doi.org/10.61332/ijpa.v9i2.570>

Abstract

Indigenous community-based ecotourism requires governance that can balance economic benefits, cultural preservation, environmental conservation, and the authority of local institutions. This study aims to analyze collaborative governance in indigenous community-based ecotourism to support sustainable tourism in Kasepuhan Karang, Lebak Regency. The study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical design. Data were collected through in-depth interviews, field observation, document review, and limited discussions involving customary leaders, village government, local government agencies, local communities, academics, and supporting tourism actors. The data were analyzed using an interactive model consisting of data reduction, data display, conclusion drawing, and thematic analysis. The findings show that Kasepuhan Karang has strong ecotourism capital through local wisdom, customary forest management, cultural rituals, traditional knowledge, and community participation. However, its development still faces several constraints, including weak coordination among actors, limited human resource capacity, insufficient integration between formal policies and customary rules, and potential risks of environmental pressure and cultural commercialization. Collaborative governance is therefore essential to strengthen the roles of customary institutions, government, SABAKI, tourism awareness groups, academics, and local communities in planning, implementation, monitoring, and benefit sharing. This study recommends an indigenous community-based ecotourism governance model that emphasizes institutional collaboration, ethnoecological protection, local capacity building, destination carrying capacity control, and tourism product innovation aligned with customary values and sustainability principles.

Keywords: *collaborative governance, ecotourism, indigenous community, sustainable tourism, Kasepuhan Karang.*

Abstrak

Pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat memerlukan tata kelola yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi, pelestarian budaya, konservasi lingkungan, dan kewenangan kelembagaan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis tata kelola kolaboratif ekowisata berbasis masyarakat adat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan diskusi terbatas dengan tokoh adat, pemerintah desa, pemerintah daerah, masyarakat lokal, akademisi, dan aktor pendukung pariwisata. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, serta analisis tematik. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Kasepuhan Karang memiliki modal ekowisata yang kuat melalui kearifan lokal, pengelolaan hutan adat, ritual budaya, dan partisipasi masyarakat. Namun, pengembangannya masih menghadapi kendala berupa koordinasi antaraktor yang belum optimal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum kuatnya integrasi kebijakan formal dengan aturan adat, serta risiko tekanan lingkungan dan komersialisasi budaya. Tata kelola kolaboratif menjadi kunci untuk memperkuat peran lembaga adat, pemerintah, SABAKI, Pokdarwis, akademisi, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pembagian manfaat ekowisata. Penelitian ini merekomendasikan model pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat adat yang menekankan kolaborasi kelembagaan, perlindungan etnoekologi, penguatan kapasitas lokal, pengendalian daya dukung destinasi, dan inovasi produk wisata yang tetap sesuai dengan nilai adat dan prinsip keberlanjutan.

Kata kunci: tata kelola kolaboratif, ekowisata, masyarakat adat, pariwisata berkelanjutan, Kasepuhan Karang.

Pendahuluan

Pariwisata berkelanjutan menjadi isu penting dalam kajian global karena pertumbuhan sektor pariwisata tidak selalu berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keadilan bagi masyarakat lokal. Dalam banyak destinasi, peningkatan kunjungan wisatawan memang mendorong pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan terhadap daya dukung alam, perubahan sosial budaya, serta komersialisasi identitas lokal. Karena itu, kajian pariwisata kontemporer mulai bergeser dari orientasi pertumbuhan menuju pendekatan yang lebih adil, inklusif, dan berbasis keberlanjutan (Higgins-Desbiolles, 2020; Rastegar et al., 2023). Sustainable tourism tidak lagi dipahami hanya sebagai strategi pengelolaan destinasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola, partisipasi, dan penguatan kapasitas masyarakat (Rasoolimanesh et al., 2023). Dalam konteks masyarakat adat, pariwisata juga berkaitan dengan hak atas budaya, pengetahuan lokal, sumber daya alam, dan kedaulatan komunitas dalam menentukan arah pembangunan (Scheyvens et al., 2021). Oleh karena itu, pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat menjadi perhatian penting karena menawarkan peluang untuk menghubungkan konservasi lingkungan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat dalam satu kerangka pembangunan yang lebih berimbang.

Kajian terkini menunjukkan bahwa ekowisata dapat menjadi alternatif dari pariwisata massal karena menekankan pengalaman berbasis alam, edukasi lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan manfaat ekonomi lokal (Fennell, 2021). Stronza et al. (2019)

menjelaskan bahwa ekowisata memiliki potensi mendukung konservasi, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekologis dan sosial. Literatur *community-based tourism* juga menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi, terutama pada kawasan yang memiliki sumber daya budaya dan alam yang rentan (Mayaka et al., 2019). Krittayaruangroj et al. (2023) menemukan bahwa penelitian tentang *community-based tourism* dalam beberapa dekade terakhir semakin banyak diarahkan pada isu partisipasi, pengambilan keputusan, manfaat ekonomi, dan konservasi warisan lokal. Dalam konteks Indonesia, dukungan masyarakat terhadap pengembangan wisata sangat dipengaruhi oleh manfaat ekonomi, keterlibatan warga, serta persepsi terhadap dampak sosial dan lingkungan (Nugroho & Numata, 2022). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan ekowisata tidak cukup hanya bertumpu pada potensi alam dan budaya, tetapi juga membutuhkan sistem tata kelola yang mampu menjamin kontrol lokal, distribusi manfaat, dan perlindungan sumber daya secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Administrasi Publik, pengembangan ekowisata tidak dapat dilepaskan dari persoalan tata kelola karena melibatkan banyak aktor dengan kewenangan, kepentingan, dan sumber daya yang berbeda. Konsep *collaborative governance* menekankan bahwa penyelesaian masalah publik yang kompleks membutuhkan dialog, kepercayaan, pembagian peran, dan komitmen bersama antarpemangku kepentingan (Ansell & Torfing, 2021). Pendekatan ini relevan untuk pengembangan ekowisata karena pemerintah, masyarakat adat, pemerintah desa, organisasi lokal, pelaku wisata, akademisi, dan komunitas pendukung perlu bekerja dalam ruang kolaborasi yang setara. Studi Mulyani et al. (2021) tentang ekowisata di Magelang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat memperkuat perencanaan, implementasi, serta pemanfaatan destinasi wisata berkelanjutan. Wardana et al. (2023) juga menegaskan bahwa keberlanjutan pariwisata pascapandemi memerlukan kerja sama multiaktor, terutama ketika destinasi menghadapi risiko tekanan fisik dan kebutuhan pengendalian daya dukung. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif menjadi pendekatan yang penting untuk membaca bagaimana relasi kelembagaan, peran aktor, dan mekanisme pengambilan keputusan memengaruhi keberlanjutan ekowisata berbasis masyarakat adat.

Kasepuhan Karang di Kabupaten Lebak merupakan salah satu komunitas masyarakat adat yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berkelanjutan. Berdasarkan tesis yang menjadi dasar artikel ini, Kasepuhan Karang memiliki modal wisata berupa nilai adat, ritual budaya, sistem pertanian tradisional, pengelolaan hutan adat, arsitektur lokal, dan pengetahuan ekologis yang diwariskan secara turun-temurun. Potensi tersebut menjadi penting karena Kabupaten Lebak menempatkan wisata budaya, wisata alam, dan wisata berbasis masyarakat adat sebagai bagian dari arah pengembangan pariwisata daerah. Namun, pengembangan wisata di kawasan masyarakat adat tidak hanya berhubungan dengan daya tarik destinasi, tetapi juga menyangkut perlindungan budaya, pengendalian dampak lingkungan, dan kejelasan relasi antara kelembagaan adat dan kelembagaan pemerintahan formal. Tesis ini juga menunjukkan bahwa pengembangan wisata Kasepuhan Karang melibatkan berbagai aktor, seperti lembaga adat, Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata, Pokdarwis, SABAKI, akademisi, dan masyarakat lokal. Kondisi tersebut menjadikan Kasepuhan Karang sebagai ruang kajian yang relevan untuk menganalisis bagaimana tata kelola kolaboratif dapat bekerja dalam konteks ekowisata berbasis masyarakat adat.

Meskipun studi tentang pariwisata berkelanjutan, ekowisata, dan community-based tourism telah banyak dilakukan, masih terdapat celah penting dalam kajian yang menghubungkan ketiga isu tersebut dengan tata kelola masyarakat adat. Previous studies have overlooked the integration of destination life cycle analysis, sustainable tourism principles, and collaborative governance in the context of indigenous community-based ecotourism. Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti aspek partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi, konservasi lingkungan, atau resiliensi komunitas secara terpisah (Musavengane & Kloppers, 2020; Espeso-Molinero & Pastor-Alfonso, 2020). Little attention has been paid to how formal government institutions and customary institutions negotiate authority, roles, and decision-making mechanisms in managing indigenous ecotourism destinations. Dalam konteks Kasepuhan Karang, tesis ini menegaskan bahwa posisi destinasi dalam Tourism Area Life Cycle, implementasi prinsip keberlanjutan, pola kolaborasi antaraktor, serta model tata kelola berbasis masyarakat adat belum dikaji secara komprehensif. Padahal, Tourism Area Life Cycle dapat membantu membaca tahap perkembangan destinasi, sementara collaborative

governance dapat menjelaskan bagaimana aktor-aktor lokal membangun koordinasi untuk menjaga keberlanjutan destinasi (Butler, 2025).

Kebaruan artikel ini terletak pada integrasi perspektif tata kelola kolaboratif, ekowisata berbasis masyarakat adat, dan pariwisata berkelanjutan dalam satu kerangka analisis yang berangkat dari kondisi empiris Kasepuhan Karang. Artikel ini tidak hanya melihat ekowisata sebagai produk wisata, tetapi sebagai proses tata kelola publik yang melibatkan relasi antara pemerintah, lembaga adat, komunitas lokal, dan aktor pendukung lainnya. Berbeda dari kajian yang hanya menekankan potensi wisata atau dampak ekonomi, artikel ini menempatkan kelembagaan adat, kearifan lokal, daya dukung lingkungan, dan kolaborasi antaraktor sebagai unsur utama keberlanjutan. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis tata kelola kolaboratif ekowisata berbasis masyarakat adat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak. Secara lebih spesifik, artikel ini bertujuan menjelaskan potensi dan tantangan ekowisata, menganalisis peran para pemangku kepentingan, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan arah model pengelolaan ekowisata yang sesuai dengan nilai adat dan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik pada kajian Administrasi Publik, khususnya dalam isu collaborative governance, implementasi kebijakan pariwisata, dan pengelolaan sumber daya berbasis masyarakat adat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena artikel berupaya memahami secara mendalam praktik tata kelola kolaboratif dalam pengembangan ekowisata berbasis masyarakat adat di Kasepuhan Karang, Kabupaten Lebak. Fokus utama penelitian bukan untuk mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, tetapi untuk menggali makna, persepsi, pengalaman, peran, dan relasi antaraktor dalam pengelolaan ekowisata. Pendekatan kualitatif juga relevan karena fenomena yang dikaji berkaitan dengan interaksi antara kelembagaan adat, pemerintah desa, pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan aktor pendukung wisata. Dengan desain deskriptif-analitis, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan kondisi empiris, tetapi juga menganalisis dinamika kolaborasi,

hambatan tata kelola, dan potensi penguatan pariwisata berkelanjutan. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposif di Kasepuhan Karang, Desa Jagakarsa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, karena wilayah ini memiliki potensi ekowisata, pengakuan hutan adat, serta praktik budaya dan kelembagaan adat yang masih hidup dalam masyarakat.

Objek penelitian ini adalah tata kelola kolaboratif ekowisata berbasis masyarakat adat dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang. Subjek penelitian terdiri atas aktor-aktor yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, atau keterlibatan langsung dalam pengembangan ekowisata. Informan dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel kualitatif dalam penelitian ini mencakup delapan kategori informan, yaitu tokoh adat Kasepuhan Karang, pengurus lembaga adat, Pemerintah Desa Jagakarsa, perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, akademisi, influencer atau promotor wisata Banten, dan masyarakat lokal Kasepuhan Karang. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi informan yang memahami kehidupan sosial budaya Kasepuhan Karang, terlibat dalam pengelolaan atau pengembangan ekowisata, memiliki kewenangan kelembagaan, atau terdampak langsung oleh aktivitas wisata. Kriteria eksklusinya adalah pihak yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, tidak memahami konteks Kasepuhan Karang, atau tidak bersedia memberikan informasi secara sukarela.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap informan kunci yang relevan dengan fokus penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan adat, arsip desa, data statistik, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang berkaitan dengan ekowisata, masyarakat adat, pariwisata berkelanjutan, dan tata kelola kolaboratif. Fokus data diarahkan pada lima aspek utama, yaitu potensi pengembangan ekowisata, peran dan partisipasi masyarakat adat, tata kelola serta dukungan kebijakan pemerintah, kendala pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, dan strategi pengembangan ekowisata yang selaras dengan nilai adat. Dengan susunan data tersebut, penelitian dapat melihat ekowisata Kasepuhan Karang bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai arena interaksi sosial, kebijakan publik, dan pelestarian lingkungan. Data dikumpulkan

secara bertahap agar informasi dari satu sumber dapat diperiksa kembali melalui sumber dan teknik lain.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang didukung oleh pedoman wawancara semi-terstruktur, pedoman observasi, catatan lapangan, dokumentasi visual, dan dokumen pendukung. Pedoman wawancara disusun untuk menggali informasi mengenai perkembangan destinasi, pembagian peran antaraktor, koordinasi kelembagaan, implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat adat, pengelolaan hutan adat, daya dukung lingkungan, dampak ekonomi, serta risiko sosial budaya. Prosedur pengumpulan data dilakukan secara kronologis melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah persiapan, yaitu penentuan fokus penelitian, pemetaan informan, penyusunan instrumen, dan pengumpulan dokumen awal terkait Kasepuhan Karang. Tahap kedua adalah pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam secara semi-terstruktur kepada informan yang telah ditentukan. Tahap ketiga adalah observasi langsung untuk mengamati aktivitas ekowisata, interaksi masyarakat dengan wisatawan, kondisi lingkungan, serta praktik penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan di lokasi penelitian.

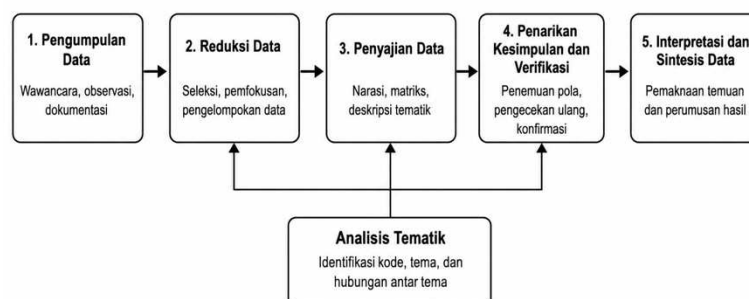
Tahap berikutnya adalah studi dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pariwisata, kelembagaan adat, arsip desa, laporan kegiatan, data statistik, foto, dan catatan sejarah Kasepuhan Karang. Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan observasi sehingga data yang diperoleh menjadi lebih kuat. Selain itu, penelitian juga dapat menggunakan Focus Group Discussion secara terbatas dengan melibatkan perwakilan masyarakat adat, pengelola ekowisata, dan pihak terkait lainnya. FGD berfungsi untuk menggali pandangan bersama, mengidentifikasi masalah dan potensi, serta mengklarifikasi temuan yang muncul dari wawancara individual. Selama proses lapangan, peneliti menyusun catatan lapangan yang berisi refleksi, temuan awal, dan dinamika interaksi di lokasi penelitian. Dokumentasi berupa foto dan rekaman audio digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat deskripsi dan analisis.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif. Proses analisis berlangsung sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu memilah, menyederhanakan,

dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan FGD dikelompokkan ke dalam tema seperti tata kelola kolaboratif, peran lembaga adat, dukungan kebijakan, partisipasi masyarakat, manfaat ekonomi, pelestarian budaya, konservasi lingkungan, dan hambatan pengembangan ekowisata. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk uraian naratif, matriks tematik, dan deskripsi hubungan antaraktor agar pola temuan lebih mudah dipahami. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi dengan membandingkan data antar sumber, antar teknik, dan hasil konfirmasi kepada informan.

Selain analisis interaktif, penelitian ini juga menggunakan analisis tematik untuk menemukan pola makna yang muncul dari data lapangan. Analisis tematik dilakukan dengan membaca ulang seluruh data, menandai informasi penting, menyusun kode awal, mengelompokkan kode ke dalam tema, dan menafsirkan hubungan antar tema. Tema yang dianalisis disesuaikan dengan kerangka artikel, yaitu collaborative governance, ekowisata berbasis masyarakat adat, pariwisata berkelanjutan, dan pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal. Interpretasi data dilakukan dengan menghubungkan temuan lapangan dengan konsep tata kelola kolaboratif, prinsip ekowisata, dan dimensi pariwisata berkelanjutan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yaitu membandingkan informasi dari tokoh adat, pemerintah, masyarakat, akademisi, dokumen, dan hasil observasi. Hasil akhir analisis digunakan untuk merumuskan gambaran tata kelola kolaboratif ekowisata Kasepuhan Karang serta arah model pengelolaan yang mendukung pariwisata berkelanjutan.

Gambar 1. Alur Analisis Data Penelitian



Sumber: Diadaptasi dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) serta Braun dan Clarke (2006).

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Destinasi dan Implementasi Prinsip Pariwisata Berkelanjutan di Kasepuhan Karang

Kasepuhan Karang merupakan salah satu komunitas masyarakat adat di Kabupaten Lebak yang memiliki potensi kuat untuk dikembangkan sebagai destinasi ekowisata berbasis masyarakat adat. Potensi tersebut terlihat dari keberadaan hutan adat, nilai kearifan lokal, ritual budaya, sistem pertanian tradisional, pengetahuan ekologis, serta pola kehidupan sosial masyarakat yang masih terikat dengan aturan adat. Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, potensi tersebut tidak hanya dipandang sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai modal sosial dan ekologis yang perlu dijaga agar tidak mengalami komersialisasi berlebihan. Pengembangan wisata di kawasan adat seperti Kasepuhan Karang menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan penguatan tata kelola lokal. Oleh karena itu, ekowisata di Kasepuhan Karang perlu ditempatkan sebagai proses pembangunan berbasis komunitas, bukan hanya sebagai aktivitas kunjungan wisata. Karakter ini sejalan dengan pandangan bahwa wisata berbasis masyarakat adat harus menjaga hubungan antara identitas budaya, ruang ekologis, dan hak masyarakat lokal dalam mengelola sumber daya (Carr, 2021).

Berdasarkan kondisi empiris, Kasepuhan Karang memiliki daya tarik utama yang bersumber dari keaslian budaya dan relasi masyarakat dengan alam. Praktik pertanian tradisional, pengelolaan hutan adat, serta ritual seperti Seren Taun menunjukkan bahwa lingkungan tidak dipandang sebagai aset ekonomi semata, tetapi sebagai bagian dari sistem kehidupan masyarakat adat. Temuan dalam tesis menunjukkan bahwa masyarakat Kasepuhan Karang masih menggantungkan kehidupan pada pertanian tradisional, baik huma maupun sawah, yang di dalamnya melekat nilai spiritual, sosial, dan ekologis. Keberadaan flora, fauna, tanaman pangan lokal, tanaman obat, dan hutan adat juga menjadi bagian penting dari potensi ekowisata berbasis etnoekologi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengembangan wisata di Kasepuhan Karang memiliki basis yang kuat karena bersandar pada kekayaan budaya dan alam yang hidup dalam keseharian masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa masyarakat adat memiliki sistem

pengetahuan lokal yang berperan penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan budaya (Iskandar & Iskandar, 2022).

Jika dianalisis melalui pendekatan Tourism Area Life Cycle, perkembangan Kasepuhan Karang menunjukkan dinamika yang tidak sepenuhnya sama dengan destinasi wisata konvensional. Dalam teori Butler, destinasi bergerak dari fase exploration, involvement, development, consolidation, stagnation, decline, hingga rejuvenation sesuai dengan perubahan jumlah kunjungan, fasilitas, keterlibatan masyarakat, dan tingkat pengelolaan destinasi (Butler, 1980). Pada fase awal, Kasepuhan Karang lebih dekat dengan karakter exploration karena wisata belum menjadi aktivitas ekonomi utama, jumlah wisatawan masih terbatas, dan daya tarik utama masih bertumpu pada keaslian alam serta budaya. Setelah adanya pengakuan terhadap hutan adat dan meningkatnya perhatian berbagai pihak, destinasi mulai bergerak menuju fase involvement dan development. Masyarakat mulai terlibat dalam aktivitas wisata, produk wisata alam dan budaya mulai diperkenalkan, serta promosi mulai dilakukan melalui jejaring sosial dan aktor pendukung wisata. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh penguatan kelembagaan, sistem promosi, kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi antaraktor.

Tabel 1. Posisi Perkembangan Destinasi dan Implementasi Prinsip Keberlanjutan di Kasepuhan Karang

Aspek Analisis	Temuan Utama	Implikasi terhadap Pariwisata Berkelanjutan
Posisi dalam TALC	Kasepuhan Karang bergerak dari exploration menuju involvement dan development, tetapi menunjukkan gejala stagnasi kelembagaan	Diperlukan penguatan tata kelola agar destinasi tidak berhenti pada potensi, tetapi berkembang secara terarah
Ekonomi	Wisata membuka peluang pendapatan melalui pemandu lokal, homestay, produk lokal, dan jasa wisata	Manfaat ekonomi perlu dikelola secara adil agar tidak hanya dinikmati oleh aktor tertentu
Sosial budaya	Ritual adat, pengetahuan lokal, pertanian tradisional, dan kelembagaan adat masih menjadi identitas utama	Pengembangan wisata harus menjaga nilai adat dan mencegah komersialisasi budaya
Lingkungan	Hutan adat, zonasi lokal, flora, fauna, dan sistem etnoekologi menjadi daya tarik utama	Pengelolaan kunjungan perlu memperhatikan daya dukung dan aturan adat

Aspek Analisis	Temuan Utama	Implikasi terhadap Pariwisata Berkelanjutan
Tata kelola	Terdapat keterlibatan lembaga adat, pemerintah, masyarakat, dan aktor pendukung, tetapi koordinasi belum optimal	Kolaborasi perlu diperkuat melalui pembagian peran, musyawarah, dan integrasi aturan adat dengan kebijakan formal

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Kasepuhan Karang memiliki modal destinasi yang kuat, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek tata kelola. Secara ekonomi, ekowisata mulai membuka peluang bagi masyarakat lokal melalui kegiatan pemanduan, layanan kunjungan, homestay, dan produk berbasis budaya atau hasil lokal. Namun, manfaat ekonomi tersebut belum cukup kuat apabila tidak didukung oleh mekanisme pembagian manfaat yang jelas dan kapasitas pengelolaan yang merata. Dari aspek sosial budaya, keberadaan ritual adat, norma komunitas, dan pengetahuan lokal menjadi daya tarik utama sekaligus batas etis dalam pengembangan wisata. Wisatawan tidak dapat diposisikan semata sebagai konsumen atraksi budaya, tetapi perlu diarahkan untuk memahami nilai adat dan menghormati ruang kehidupan masyarakat. Dalam perspektif pariwisata berbasis pengalaman, keaslian budaya dan keterlibatan komunitas menjadi unsur penting yang membedakan destinasi adat dari destinasi massal (Stone et al., 2023).

Pada aspek lingkungan, Kasepuhan Karang memiliki fondasi keberlanjutan yang kuat karena masyarakat adat telah lama mengenal sistem pengelolaan sumber daya berbasis kearifan lokal. Hutan adat tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekologis, tetapi juga memiliki makna sosial, spiritual, dan ekonomi bagi masyarakat. Dalam tesis dijelaskan bahwa merusak hutan dipahami sebagai tindakan yang sama dengan merusak sumber kehidupan masyarakat itu sendiri. Pandangan ini menunjukkan bahwa konservasi lingkungan di Kasepuhan Karang tidak hanya lahir dari regulasi formal, tetapi juga dari nilai adat yang melekat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, prinsip keberlanjutan lingkungan perlu diwujudkan melalui pengaturan rute wisata, pembatasan aktivitas di zona tertentu, edukasi wisatawan, dan pengendalian sampah. Pola ini sejalan dengan pandangan bahwa konservasi berbasis komunitas akan lebih kuat apabila didukung oleh pengetahuan lokal dan kepatuhan terhadap norma adat (Hanafi et al., 2014).

Meskipun memiliki potensi besar, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan Kasepuhan Karang mulai menghadapi gejala stagnasi yang bersifat kelembagaan. Stagnasi tersebut bukan terutama disebabkan oleh hilangnya daya tarik alam dan budaya, melainkan oleh belum optimalnya koordinasi antara lembaga adat, pemerintah, dan aktor pendukung wisata. Tesis menunjukkan bahwa fase development ditandai oleh meningkatnya kunjungan, berkembangnya produk wisata alam dan budaya, serta promosi digital, tetapi belum diikuti oleh penguatan tata kelola dan sistem kolaborasi yang memadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan destinasi adat tidak cukup hanya diukur dari jumlah wisatawan atau munculnya produk wisata baru. Keberlanjutan destinasi justru sangat ditentukan oleh kualitas kelembagaan, kapasitas masyarakat, serta kemampuan aktor lokal dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks ini, tata kelola destinasi perlu memperkuat partisipasi masyarakat agar manfaat wisata tidak menggerus kontrol komunitas atas sumber daya lokal (Suharti & Darmawan, 2020).

Dengan demikian, posisi Kasepuhan Karang dapat dipahami sebagai destinasi yang telah melewati fase awal dan sedang berada pada fase pengembangan, tetapi membutuhkan penguatan menuju rejuvenation. Fase peremajaan dalam konteks Kasepuhan Karang tidak cukup dilakukan melalui promosi, penambahan fasilitas, atau diversifikasi atraksi wisata. Peremajaan perlu dimulai dari penguatan tata kelola kolaboratif, revitalisasi kelembagaan adat, peningkatan kapasitas masyarakat, perlindungan hutan adat, dan integrasi pengetahuan etnoekologi ke dalam pengelolaan destinasi. Temuan tesis menegaskan bahwa strategi rejuvenation di Kasepuhan Karang harus memadukan konservasi lingkungan, kepatuhan terhadap hukum adat, inovasi produk wisata, dan transformasi digital. Dengan arah tersebut, ekowisata tidak hanya menjadi sumber pendapatan baru, tetapi juga menjadi instrumen pelestarian budaya dan perlindungan lingkungan. Hal ini memperkuat pandangan bahwa pariwisata berkelanjutan menuntut keseimbangan antara manfaat ekonomi, keadilan sosial, pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan tata kelola yang partisipatif (Purnamasari, 2021).

Praktik Collaborative Governance dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat Adat

Praktik *collaborative governance* dalam pengembangan ekowisata Kasepuhan Karang menunjukkan bahwa keberlanjutan destinasi sangat ditentukan oleh kemampuan para aktor untuk membangun pembagian peran, koordinasi, dan kepercayaan bersama. Dalam konteks masyarakat adat, pengembangan ekowisata tidak dapat hanya digerakkan oleh pemerintah atau pasar wisata, tetapi harus bertumpu pada legitimasi sosial masyarakat adat. Kasepuhan Karang memiliki kelembagaan adat yang berfungsi menjaga norma, nilai, batasan budaya, serta hubungan masyarakat dengan hutan adat. Pada saat yang sama, pemerintah desa dan pemerintah daerah memiliki peran formal dalam perencanaan, fasilitasi program, promosi, dan dukungan infrastruktur. Kondisi ini menunjukkan adanya dua sistem kelembagaan yang berjalan bersamaan, yaitu kelembagaan adat dan kelembagaan pemerintahan formal. Karena itu, kolaborasi menjadi kebutuhan utama agar pengembangan ekowisata tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan, dan pelemahan nilai adat.

Dalam perspektif administrasi publik, *collaborative governance* menekankan pentingnya keterlibatan aktor lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan publik yang tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga saja. Ansell dan Torfing (2021) menjelaskan bahwa tata kelola publik modern membutuhkan proses *co-creation*, yaitu keterlibatan pemerintah, masyarakat, organisasi lokal, dan aktor pendukung dalam merumuskan solusi bersama. Hal ini relevan dengan pengembangan ekowisata Kasepuhan Karang karena destinasi ini tidak hanya menyangkut promosi wisata, tetapi juga perlindungan hutan adat, pelestarian budaya, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengendalian dampak kunjungan. Torfing et al. (2019) juga menegaskan bahwa kolaborasi publik memerlukan ruang dialog, pembagian tanggung jawab, serta kemampuan mengelola hambatan kelembagaan. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan ekowisata Kasepuhan Karang sangat bergantung pada kualitas interaksi antara lembaga adat, pemerintah, SABAKI, Pokdarwis, akademisi, pemuda adat, dan masyarakat lokal. Studi tentang ekowisata di Magelang juga menunjukkan bahwa penguatan kolaborasi antaraktor menjadi syarat penting untuk menjaga keseimbangan antara konservasi alam, aktivitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat (Mulyani et al., 2021).

Tabel 2. Peran Aktor dalam Collaborative Governance Ekowisata Kasepuhan Karang

Aktor	Peran Utama	Bentuk Kontribusi	Tantangan Kolaborasi
Lembaga adat Kasepuhan Karang	Penjaga nilai, norma, hukum adat, dan hutan adat	Menentukan batasan budaya, menjaga tata kelola adat, mengatur ruang sakral dan ruang wisata	Integrasi aturan adat dengan program formal belum sepenuhnya kuat
Pemerintah desa	Fasilitator pembangunan lokal	Mendukung perencanaan desa, koordinasi kegiatan, dan kebutuhan dasar wisata	Kapasitas kelembagaan dan anggaran masih terbatas
Pemerintah daerah	Pembuat kebijakan dan pendukung program	Fasilitasi promosi, pelatihan, infrastruktur, dan kebijakan pariwisata	Koordinasi lintas perangkat daerah belum optimal
SABAKI	Penguat jejaring masyarakat adat	Advokasi hak masyarakat adat, penguatan identitas, dan perlindungan hukum adat	Perlu penguatan peran dalam skema operasional wisata
Pokdarwis dan pemuda adat	Pengelola teknis dan promotor lokal	Pemanduan, promosi digital, pengembangan atraksi, dan pelayanan wisata	Keterampilan manajemen wisata dan digitalisasi masih perlu ditingkatkan
Akademisi	Pendamping ilmiah dan pengembang model	Kajian, pelatihan, rekomendasi kebijakan, dan penguatan kapasitas	Keterlibatan perlu dibuat lebih berkelanjutan
Masyarakat lokal	Subjek utama dan penerima manfaat	Partisipasi dalam layanan wisata, homestay, produk lokal, dan pelestarian adat	Pembagian manfaat dan partisipasi belum merata

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa setiap aktor memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam membangun tata kelola ekowisata. Lembaga adat menempati posisi paling mendasar karena memiliki legitimasi kultural dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam ruang adat. Pemerintah desa dan pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dengan agenda pembangunan formal, terutama dalam dukungan program, promosi, dan infrastruktur. SABAKI memperkuat posisi masyarakat adat melalui jejaring dan advokasi, sedangkan Pokdarwis serta pemuda adat menjadi penggerak operasional di

tingkat destinasi. Akademisi berperan memberikan pendampingan berbasis pengetahuan, sedangkan masyarakat lokal menjadi subjek utama yang harus memperoleh manfaat dari ekowisata. Pola seperti ini sejalan dengan gagasan bahwa tata kelola pariwisata berkelanjutan membutuhkan keterlibatan multiaktor, bukan hanya keputusan yang bersifat top-down (Bramwell et al., 2017).

Mekanisme koordinasi dalam pengembangan ekowisata Kasepuhan Karang berlangsung melalui musyawarah, komunikasi informal, koordinasi program, dan pelibatan aktor lokal dalam kegiatan wisata. Musyawarah adat menjadi ruang penting karena keputusan yang menyangkut wilayah adat, ritual, dan pemanfaatan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari persetujuan komunitas. Dalam praktiknya, pemerintah tetap membutuhkan legitimasi lembaga adat agar program wisata tidak bertentangan dengan nilai lokal. Sebaliknya, lembaga adat juga membutuhkan dukungan pemerintah dalam aspek legalitas, fasilitas, promosi, dan peningkatan kapasitas. Hubungan ini menunjukkan bahwa kolaborasi di Kasepuhan Karang bukan hanya kerja sama teknis, tetapi juga negosiasi antara kewenangan formal dan kewenangan adat. Dalam konteks pariwisata masyarakat adat, model kolaborasi semacam ini penting karena pengembangan wisata harus menghormati nilai budaya, hak komunitas, dan orientasi keberlanjutan lokal (Nugroho et al., 2024).

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi yang berjalan belum sepenuhnya optimal. Beberapa tantangan utama muncul dalam bentuk koordinasi antaraktor yang belum konsisten, belum terbentuknya kelembagaan pengelola destinasi yang kuat, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya promosi digital, dan belum jelasnya mekanisme pembagian manfaat. Tesis menunjukkan bahwa stagnasi pengembangan Kasepuhan Karang lebih banyak dipengaruhi oleh kegagalan tata kelola daripada oleh tekanan jumlah wisatawan. Artinya, masalah utama bukan hanya kurangnya atraksi wisata, tetapi belum kuatnya sistem kerja bersama antaraktor. Temuan ini sejalan dengan Reindrawati (2023), yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pariwisata sering terhambat oleh kapasitas, akses informasi, struktur kekuasaan, dan lemahnya ruang pengambilan keputusan. Karena itu, penguatan kolaborasi harus diarahkan pada pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih jelas, inklusif, dan berkelanjutan.

Tantangan lain terletak pada integrasi antara aturan adat dan kebijakan formal. Peraturan daerah tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat telah memberikan dasar penting bagi penguatan masyarakat adat Kasepuhan. Akan tetapi, dalam praktik pengembangan ekowisata, pengakuan formal tersebut masih perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme operasional yang lebih konkret. Misalnya, perlu ada aturan bersama mengenai batas kunjungan wisatawan, zonasi ruang adat, standar perilaku wisatawan, pembagian manfaat ekonomi, serta tanggung jawab pengawasan lingkungan. Jika integrasi tersebut lemah, pengembangan wisata berisiko bergerak mengikuti logika pasar dan promosi, bukan berdasarkan nilai adat dan daya dukung lingkungan. Wiyono et al. (2023) menegaskan bahwa ekowisata berbasis pemberdayaan komunitas akan lebih kuat jika memadukan potensi lokal, penguatan kapasitas, dan nilai lingkungan dalam satu sistem pengelolaan.

Dengan demikian, praktik *collaborative governance* di Kasepuhan Karang dapat dipahami sebagai proses yang sudah mulai terbentuk, tetapi masih membutuhkan penguatan kelembagaan. Kolaborasi telah terlihat melalui keterlibatan lembaga adat, pemerintah, SABAKI, Pokdarwis, akademisi, pemuda adat, dan masyarakat lokal dalam pengembangan ekowisata. Namun, kolaborasi tersebut belum sepenuhnya menjadi sistem tata kelola yang stabil karena masih menghadapi kendala koordinasi, kapasitas, pembagian kewenangan, dan integrasi kebijakan. Penguatan ke depan perlu diarahkan pada pembentukan forum kolaboratif yang tetap menghormati musyawarah adat, penyusunan peta peran antaraktor, peningkatan kapasitas pengelola lokal, dan penyusunan pedoman ekowisata berbasis nilai adat. Dengan langkah tersebut, ekowisata Kasepuhan Karang dapat berkembang sebagai destinasi yang tidak hanya menarik secara wisata, tetapi juga kuat secara kelembagaan, adil secara sosial, dan berkelanjutan secara ekologis. Inilah posisi penting *collaborative governance* sebagai jembatan antara perlindungan masyarakat adat dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Faktor Pendukung, Penghambat, dan Model Tata Kelola Ekowisata Berkelanjutan

Pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang ditopang oleh beberapa faktor utama yang bersumber dari kekuatan internal masyarakat adat. Faktor paling mendasar adalah keberadaan kelembagaan adat yang masih memiliki legitimasi

sosial dalam mengatur kehidupan masyarakat, menjaga nilai budaya, serta mengendalikan pemanfaatan ruang adat. Kelembagaan adat berperan sebagai penjaga batas agar pengembangan wisata tidak bertentangan dengan hukum adat, norma sosial, dan prinsip perlindungan lingkungan. Selain itu, keberadaan hutan adat menjadi modal ekologis penting karena tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai ruang hidup, sumber pengetahuan lokal, dan simbol hubungan masyarakat dengan alam. Kearifan lokal yang melekat dalam sistem pertanian, pengelolaan hutan, ritual adat, dan pola hidup masyarakat menjadi pembeda utama Kasepuhan Karang dibandingkan destinasi wisata biasa. Dalam konteks ini, pengembangan ekowisata dapat dipahami sebagai upaya menjaga hubungan antara manusia, budaya, dan lingkungan secara berkelanjutan (Berkes, 2018).

Faktor pendukung lainnya adalah adanya partisipasi masyarakat, keterlibatan pemuda adat, potensi budaya, serta dukungan kebijakan terhadap pengakuan masyarakat adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat lokal mulai terlibat dalam aktivitas wisata, baik melalui layanan pemanduan, promosi, penyediaan homestay, maupun pengenalan produk dan atraksi lokal. Keterlibatan tersebut penting karena ekowisata berbasis masyarakat adat tidak dapat berjalan apabila masyarakat hanya diposisikan sebagai objek pembangunan. Partisipasi masyarakat perlu ditempatkan sebagai inti pengelolaan karena merekalah yang memahami nilai adat, batas ruang sakral, dan daya dukung lingkungan. Dalam pengembangan pariwisata komunitas, partisipasi lokal menjadi syarat utama agar manfaat ekonomi tidak menghilangkan kontrol masyarakat terhadap sumber daya mereka sendiri (Dangi & Jamal, 2016). Selain itu, dukungan kebijakan melalui pengakuan masyarakat adat memberikan dasar legal bagi perlindungan hak ulayat dan penguatan posisi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata.

Tabel 3. Faktor Pendukung, Penghambat, dan Arah Penguatan Ekowisata Berkelanjutan di Kasepuhan Karang

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Arah Penguatan
Kelembagaan adat	Lembaga adat masih memiliki legitimasi sosial dan kewenangan budaya	Hubungan antara lembaga adat dan pemerintah desa belum selalu harmonis	Penguatan forum musyawarah adat dan koordinasi formal
Lingkungan	Hutan adat, zonasi lokal, dan pengetahuan	Risiko tekanan lingkungan jika	Penetapan daya dukung, aturan

Aspek	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Arah Penguatan
Sosial budaya	etnoekologi masih terjaga	kunjungan tidak dikendalikan	kunjungan, dan edukasi wisatawan
	Ritual, nilai adat, dan tradisi lokal menjadi identitas utama destinasi	Risiko komersialisasi budaya dan perubahan nilai generasi muda	Perlindungan atraksi budaya melalui aturan adat dan kurasi wisata
Ekonomi lokal	Wisata membuka peluang pendapatan melalui pemandu, homestay, dan produk lokal	Mekanisme pembagian manfaat belum sepenuhnya kuat	Sistem benefit sharing yang transparan dan berbasis musyawarah
Sumber daya manusia	Pemuda adat mulai terlibat dalam promosi dan operasional wisata	Kapasitas manajemen wisata dan digitalisasi masih terbatas	Pelatihan pemanduan, hospitality, promosi digital, dan manajemen destinasi
Infrastruktur	Dukungan pemerintah mulai muncul melalui pelatihan, promosi, dan pendampingan	Aksesibilitas dan fasilitas dasar wisata masih terbatas	Perbaikan akses, fasilitas publik, dan sarana pendukung yang ramah lingkungan
Kolaborasi aktor	Terdapat keterlibatan lembaga adat, pemerintah, SABAKI, akademisi, dan masyarakat	Koordinasi antaraktor belum optimal dan belum adaptif	Kolaborasi pentahelix berbasis peran yang jelas

Sumber: Diolah penulis (2026)

Tabel tersebut menunjukkan bahwa faktor pendukung dan penghambat ekowisata Kasepuhan Karang saling berkaitan. Kekuatan adat dan lingkungan menjadi modal utama, tetapi belum cukup apabila tidak didukung oleh koordinasi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan yang terarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stagnasi pengembangan Kasepuhan Karang bukan disebabkan oleh hilangnya potensi budaya atau rusaknya lingkungan, melainkan lebih dipengaruhi oleh lemahnya tata kelola destinasi. Beberapa indikator penghambat yang ditemukan meliputi keterbatasan aksesibilitas, kurangnya inovasi produk wisata, melemahnya promosi digital, belum optimalnya pengelolaan destinasi, rendahnya kolaborasi antaraktor, serta munculnya disharmoni antara kelembagaan adat dan pemerintah desa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan ekowisata membutuhkan mekanisme kolaborasi

yang lebih kuat, bukan hanya penambahan atraksi wisata atau promosi semata. Dalam perspektif tata kelola pariwisata, keberlanjutan destinasi sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi, keadilan dalam pengambilan keputusan, dan kemampuan aktor lokal mengelola kepentingan bersama (Jamal & Camargo, 2018).

Faktor penghambat lain yang perlu mendapat perhatian adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan belum kuatnya mekanisme pembagian manfaat. Pengelolaan ekowisata membutuhkan kemampuan dalam pemanduan, pelayanan wisata, interpretasi budaya, promosi digital, pengelolaan homestay, manajemen keuangan, dan pengendalian dampak lingkungan. Apabila kapasitas tersebut belum merata, maka manfaat wisata berisiko hanya dinikmati oleh kelompok tertentu dan tidak memperkuat kesejahteraan masyarakat secara luas. Selain itu, belum kuatnya sistem pembagian manfaat dapat menimbulkan ketimpangan internal dan melemahkan dukungan masyarakat terhadap ekowisata. Dalam pengelolaan destinasi berbasis komunitas, distribusi manfaat yang adil menjadi unsur penting agar masyarakat tetap memiliki rasa kepemilikan terhadap program wisata (Reed et al., 2018). Oleh karena itu, Kasepuhan Karang membutuhkan sistem benefit sharing yang disepakati melalui musyawarah adat dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat tersebut, model tata kelola ekowisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang perlu dibangun melalui empat lapisan utama. Lapisan pertama adalah kelembagaan adat dan kearifan lokal sebagai fondasi, karena aturan adat, nilai budaya, dan sistem etnoekologi menjadi dasar legitimasi pengelolaan. Lapisan kedua adalah kolaborasi multiaktor sebagai mekanisme kerja, yang melibatkan lembaga adat, pemerintah desa, pemerintah daerah, SABAKI, Pokdarwis, akademisi, pemuda adat, pelaku promosi, dan masyarakat lokal. Lapisan ketiga adalah penguatan kapasitas dan regulasi, yang mencakup pelatihan pengelola, penyusunan aturan kunjungan, penguatan kelembagaan destinasi, promosi digital, perbaikan infrastruktur, serta perlindungan ruang adat dan lingkungan. Lapisan keempat adalah pariwisata berkelanjutan sebagai tujuan akhir, yang ditandai dengan meningkatnya manfaat ekonomi, terjaganya nilai budaya, terlindunginya hutan adat, serta menguatnya partisipasi masyarakat. Model ini sejalan dengan pandangan bahwa pengelolaan

pariwisata berkelanjutan harus memadukan dimensi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan tata kelola dalam satu sistem yang saling mendukung (Hall, 2019).

Secara sederhana, model tata kelola yang ditawarkan dalam artikel ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Gambar 2. Model Tata Kelola Ekowisata Berkelanjutan Berbasis Masyarakat Adat



Sumber: Diolah penulis, 2026.

Model tersebut menjadi kebaruan artikel karena menempatkan kelembagaan adat bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai fondasi utama dalam tata kelola ekowisata. Pada destinasi berbasis masyarakat adat, keberlanjutan tidak cukup dicapai melalui peningkatan kunjungan dan pembangunan fasilitas. Keberlanjutan justru ditentukan oleh sejauh mana masyarakat adat tetap memiliki kontrol terhadap ruang, budaya, pengetahuan lokal, dan sumber daya alamnya. Dengan demikian, model ini memperluas pemahaman bahwa pengembangan ekowisata tidak hanya membutuhkan strategi pasar, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang adil, partisipatif, dan berbasis nilai lokal. Pengembangan Kasepuhan Karang perlu diarahkan pada peremajaan destinasi yang dimulai dari pembenahan kelembagaan, penguatan kolaborasi pentahelix, inovasi produk wisata yang sesuai adat, serta perlindungan sistem sosial-ekologis masyarakat.

Dengan demikian, faktor pendukung utama pengembangan ekowisata Kasepuhan Karang terletak pada kekuatan adat, hutan adat, kearifan lokal, partisipasi masyarakat, potensi budaya, serta dukungan kebijakan terhadap masyarakat adat. Sementara itu, faktor penghambat utama terletak pada koordinasi yang belum optimal, keterbatasan

kapasitas sumber daya manusia, aksesibilitas, risiko komersialisasi budaya, tekanan lingkungan, dan belum kuatnya mekanisme pembagian manfaat. Oleh karena itu, tata kelola ekowisata berkelanjutan perlu dibangun melalui model kolaboratif yang menjadikan adat sebagai fondasi, kolaborasi sebagai mekanisme, penguatan kapasitas dan regulasi sebagai strategi, serta pariwisata berkelanjutan sebagai tujuan akhir. Model ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi lokal, pelestarian budaya, konservasi lingkungan, dan penguatan tata kelola masyarakat adat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Kasepuhan Karang memiliki posisi strategis sebagai destinasi ekowisata berbasis masyarakat adat karena didukung oleh potensi hutan adat, ritual budaya, sistem pertanian tradisional, kearifan lokal, dan kelembagaan adat yang masih hidup dalam masyarakat. Dalam perspektif Tourism Area Life Cycle Butler, perkembangan Kasepuhan Karang menunjukkan pergerakan dari tahap exploration menuju involvement dan development. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya kuat karena masih menghadapi gejala stagnasi kelembagaan, terutama pada aspek koordinasi, kapasitas pengelolaan, promosi, infrastruktur, dan kelembagaan destinasi. Oleh karena itu, Kasepuhan Karang membutuhkan penguatan menuju tahap rejuvenation melalui pembenahan tata kelola, inovasi produk ekowisata, serta perlindungan nilai adat dan lingkungan.

Implementasi prinsip pariwisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang telah terlihat pada aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan tata kelola. Pada aspek ekonomi, ekowisata mulai membuka peluang pendapatan bagi masyarakat melalui pemanduan, homestay, produk lokal, dan aktivitas wisata berbasis budaya. Pada aspek sosial budaya, keberadaan ritual adat, norma lokal, dan sistem nilai masyarakat menjadi fondasi penting dalam menjaga identitas Kasepuhan Karang. Pada aspek lingkungan, hutan adat dan pengetahuan etnoekologi menjadi modal utama dalam konservasi sumber daya alam. Namun, seluruh potensi tersebut tetap memerlukan pengendalian agar pengembangan wisata tidak menimbulkan komersialisasi budaya, ketimpangan manfaat, dan tekanan terhadap daya dukung lingkungan.

Praktik collaborative governance dalam pengembangan ekowisata Kasepuhan Karang telah melibatkan berbagai aktor, yaitu lembaga adat, pemerintah desa, pemerintah

daerah, SABAKI, Pokdarwis, akademisi, pemuda adat, dan masyarakat lokal. Lembaga adat berperan menjaga nilai, norma, hukum adat, ruang sakral, dan pengelolaan hutan adat. Pemerintah desa dan pemerintah daerah berperan dalam dukungan kebijakan, program, promosi, fasilitas, dan koordinasi pembangunan. SABAKI memperkuat jejaring masyarakat adat, sedangkan Pokdarwis, pemuda adat, akademisi, dan masyarakat mendukung operasional wisata, pendampingan, inovasi, serta promosi. Meskipun kolaborasi telah berjalan, praktiknya masih perlu diperkuat melalui pembagian peran yang lebih jelas, forum koordinasi yang berkelanjutan, integrasi aturan adat dengan kebijakan formal, serta peningkatan kapasitas pengelola lokal.

Faktor pendukung utama pengembangan ekowisata berkelanjutan di Kasepuhan Karang adalah kuatnya kelembagaan adat, keberadaan hutan adat, nilai kearifan lokal, partisipasi masyarakat, potensi budaya, keterlibatan pemuda, serta adanya dukungan kebijakan terhadap masyarakat adat. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi koordinasi antaraktor yang belum optimal, keterbatasan sumber daya manusia, aksesibilitas yang masih terbatas, belum kuatnya promosi digital, risiko komersialisasi budaya, tekanan lingkungan, dan belum jelasnya mekanisme pembagian manfaat. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama Kasepuhan Karang bukan terletak pada ketiadaan potensi wisata, tetapi pada kebutuhan untuk memperkuat tata kelola agar pengembangan ekowisata dapat berjalan lebih terarah, adil, dan berkelanjutan.

Model tata kelola yang direkomendasikan dalam artikel ini menempatkan kelembagaan adat dan kearifan lokal sebagai fondasi utama. Fondasi tersebut perlu diperkuat melalui kolaborasi multiaktor yang melibatkan lembaga adat, pemerintah, SABAKI, Pokdarwis, akademisi, pemuda adat, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut kemudian diarahkan pada penguatan kapasitas, regulasi, infrastruktur, promosi digital, dan inovasi produk ekowisata. Tahap berikutnya adalah pengendalian daya dukung, perlindungan budaya, konservasi hutan adat, serta penerapan benefit sharing yang adil. Dengan model ini, ekowisata Kasepuhan Karang dapat berkembang sebagai pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat adat yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kunjungan, tetapi juga pada pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, penguatan kelembagaan lokal, dan kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for revitalizing the public sector and rejuvenating democracy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108765381>
- Berkes, F. (2018). *Sacred ecology* (4th ed.). Routledge.
- Bramwell, B., Higham, J., Lane, B., & Miller, G. (2017). Twenty-five years of sustainable tourism and the *Journal of Sustainable Tourism: Looking back and moving forward*. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(1), 1–9. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1251689>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Butler, R. W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolution: Implications for management of resources. *The Canadian Geographer*, 24(1), 5–12. <https://doi.org/10.1111/j.1541-0064.1980.tb00970.x>
- Butler, R. W. (2025). Tourism destination development: The tourism area life cycle model. *Tourism Geographies*, 27(3–4), 599–607. <https://doi.org/10.1080/14616688.2024.2325932>
- Carr, A. (2021). Indigenous tourism, cultural identity, and sustainable development. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(12), 1947–1964.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dangi, T. B., & Jamal, T. (2016). An integrated approach to sustainable community-based tourism. *Sustainability*, 8(5), 475. <https://doi.org/10.3390/su8050475>
- Espeso-Molinero, P., & Pastor-Alfonso, M. J. (2020). Governance, community resilience, and indigenous tourism in Nahá, Mexico. *Sustainability*, 12(15), 5973. <https://doi.org/10.3390/su12155973>
- Fennell, D. A. (Ed.). (2021). *Routledge handbook of ecotourism*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003001768>
- Hall, C. M. (2019). Constructing sustainable tourism development: The 2030 agenda and the managerial ecology of sustainable tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(7), 1044–1060. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1560456>
- Hanafi, I., Ramdhaniaty, N., Nurzaman, B., Hidayati, U., & Hendarti, L. (2004). *Nyoreang alam ka tukang, nyawang anu bakal datang*. RMI, The Indonesian Institute for Forest and Environment.
- Higgins-Desbiolles, F. (2020). Socialising tourism for social and ecological justice after COVID-19. *Tourism Geographies*, 22(3), 610–623. <https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1757748>

- Iskandar, J., & Iskandar, B. S. (2022). The Sundanese traditional ecological calendar and socio-cultural changes: Case study from Rancakalong of West Java, Indonesia. In F. M. Franco, M. Knudsen, & N. H. Hassan (Eds.), *Case studies in biocultural diversity from Southeast Asia* (pp. 79–103). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-16-6719-0_4
- Jamal, T., & Camargo, B. A. (2018). Tourism governance and policy: Whither justice? *Tourism Management Perspectives*, 25, 205–208. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2017.11.009>
- Krittayaruangroj, K., Suriyankietkaew, S., & Hallinger, P. (2023). Research on sustainability in community-based tourism: A bibliometric review and future directions. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 28(9), 1031–1051. <https://doi.org/10.1080/10941665.2023.2276477>
- Mayaka, M., Croy, W. G., & Wolfram Cox, J. (2019). A dimensional approach to community-based tourism: Recognising and differentiating form and context. *Annals of Tourism Research*, 74, 177–190. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2018.12.002>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mulyani, S., Ahsani, R. D. P., & Wijaya, D. N. (2021). Collaborative governance on ecotourism: Towards sustainable tourism development. *Jurnal Borneo Administrator*, 17(3), 319–334. <https://doi.org/10.24258/jba.v17i3.958>
- Musavengane, R., & Kloppers, R. (2020). Social capital: An investment towards community resilience in the collaborative natural resources management of community-based tourism schemes. *Tourism Management Perspectives*, 34, 100654. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2020.100654>
- Nugroho, K. S., Ardiyansah, & Sjafari, A. (2024). “HERE” collaborative governance: Tourism development model of the Baduy indigenous people in Indonesia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(1), 1–23. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i1.2823>
- Nugroho, P., & Numata, S. (2022). Resident support of community-based tourism development: Evidence from Gunung Ciremai National Park, Indonesia. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(11), 2510–2525. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1755675>
- Purnamasari, A. (2021). Daya dukung lingkungan dalam pengembangan pariwisata. *Jurnal Sumber Daya Alam dan Lingkungan*, 8(2), 123–135.
- Rasoolimanesh, S. M., Ramakrishna, S., Hall, C. M., Esfandiar, K., & Seyfi, S. (2023). A systematic scoping review of sustainable tourism indicators in relation to the sustainable development goals. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(7), 1497–1517. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1775621>
- Rastegar, R., Higgins-Desbiolles, F., & Ruhanen, L. (2023). Tourism, global crises and justice: Rethinking, redefining and reorienting tourism futures. *Journal of*

- Sustainable Tourism, 31(12), 2613–2627.
<https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2219037>
- Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., de Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., Huber, T., Neumann, R. K., Oughton, E. A., Sidoli del Ceno, J., & van Delden, H. (2018). A theory of participation: What makes stakeholder and public engagement in environmental management work? *Restoration Ecology*, 26(S1), S7–S17.
<https://doi.org/10.1111/rec.12541>
- Reindrawati, D. Y. (2023). Challenges of community participation in tourism planning in developing countries. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2164240.
<https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2164240>
- Scheyvens, R., Carr, A., Movono, A., Hughes, E., Higgins-Desbiolles, F., & Mika, J. P. (2021). Indigenous tourism and the sustainable development goals. *Annals of Tourism Research*, 90, 103260. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103260>
- Stone, M. J., Soulard, J., Migacz, S., & Wolf, E. (2023). Elements of memorable tourism experiences in food tourism. *Journal of Travel Research*, 62(2), 384–399.
- Stronza, A. L., Hunt, C. A., & Fitzgerald, L. A. (2019). Ecotourism for conservation? *Annual Review of Environment and Resources*, 44, 229–253.
<https://doi.org/10.1146/annurev-environ-101718-033046>
- Suharti, N., & Darmawan, A. (2020). Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 3(1), 34–48.
- Torfin, J., Sørensen, E., & Røiseland, A. (2019). Transforming the public sector into an arena for co-creation: Barriers, drivers, benefits, and ways forward. *Administration & Society*, 51(5), 795–825. <https://doi.org/10.1177/0095399716680057>
- Wardana, S., Handayani, D., & Ilmika, A. (2023). Community participation-based tourism governance in post COVID-19: Case study on conservation in Borobudur Temple. *International Journal of Conservation Science*, 14(4), 1591–1608.
- Wiyono, S. H., Subianto, A., & Nuhman. (2023). Sustainable ecotourism development and community empowerment: A case study of the Center for Environmental Education in Seloliman Village, Indonesia. *Society*, 11(2), 310–328.
<https://doi.org/10.33019/society.v11i2.528>
- Yin, Z., Huang, A., Wang, J., & Huang, A. (2023). Memorable tourism experiences' formation mechanism in cultural creative tourism: From the perspective of embodied cognition. *Sustainability*, 15(5), 4055.
<https://doi.org/10.3390/su15054055>